



TINDAK TEGAS - Proses penindakan papan reklame bermasalah yang dilakukan jajaran Satpol PP Kota Yogyakarta. Saat ini sudah ada ratusan reklame yang diterbitkan sepanjang 2022.

Satpol PP Terbitkan Ratusan Reklame Bodong di Kota Yogya

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta menertibkan ratusan papan reklame bermasalah di Kota Yogyakarta sepanjang 2022. Selain non yustisi, penindakan yustisi juga diterapkan aparat penegak Peraturan Daerah (Perda).

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto, mengatakan, terdapat 138 reklame yang ditindak secara non yustisi. Yakni, berupa pelayanan surat peringatan, hingga penghentian fungsi, serta pembongkaran oleh petugas dan pemilik.

Dia mengatakan, sebagian besar, atau 129 papan reklame memang masih sebatas diberi teguran tertulis dan mendapat kesempatan untuk memenuhi kewajiban terkait pajak. Namun, di luar itu, terdapat 5 reklame yang dihentikan fungsinya, dan 4 dibongkar.

"Non yustisi lebih ke sanksi administrasi. Tetapi, ada yang sampai kita henti fungsi juga, ya, jadi re-

klamennya ditutup stiker. Kami beri keterangan, bahwa reklame ini tak punya izin dan melanggar Perda. Kemudian, kalau yang dibongkar, kami menyalur sampai ke tiang-tiangnya," ujarnya, Kamis (29/9).

Sementara bagi pemilik reklame yang tetap mengabaikan teguran, cetusnya, eksekutif terpaksa menjatuhkan sanksi yustisi dan diseret ke meja hijau. Persidangan menjadi jalan terakhir untuk memberikan efek jera, sehingga pemasangan reklame dilakukan secara tertib, sesuai peraturan daerah.

"Sampai 29 September 2022 ini, ada 91 persidangan yang telah disidangkan, dengan total denda sesuai putusan hakim sebesar Rp114.750.000. Yang jelas, uangnya kembali lagi ke negara itu, karena lewat proses persidangan," ungkap Dodi.

Dia memaparkan, lantaran sidangnya di Pengadilan Negeri, dan setiap minggu memang kita agendakan dua kali persidangan, terkait berbagai macam pelanggaran. Tapi,

sejauh ini, kebanyakan itu terkait perzinan reklame," tambahnya.

Ia menyatakan, beberapa papan reklame bermasalah tersebut merupakan temuan dan rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI yang turut melakukan pengawasan di wilayahnya. Di samping itu, Pemkot Yogya juga mempunyai tim pengawasan terpadu, yang merupakan gabungan deretan OPD.

"BPK punya info, mana yang sudah, dan mana yang belum bayar (pajak). Karena ini terkait potensi kecocoran pajak daerah juga. Maka, tim pengawasan terpadu, yang di dalamnya ada BPKAD, Dinas Perzinan, Dinas Tata Ruang, Diskominfo, hingga Satpol PP, terus bergerak," ucapnya.

Dodi pun tidak menampik, dewasa ini peluang pelanggaran reklame semakin terbuka lebar. Karena itu, seandainya tidak diluncurkan pengawasan secara berala, bisa jadi suatu saat nanti Kota Yogyakarta akan dipenuhi reklame ilegal. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005